

LAPORAN KINERJA

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2016**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja adalah salah satu komponen utama dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan berperan sebagai wadah untuk menunjukkan capaian prestasi dari lembaga pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2015 ini adalah perwujudan kewajiban Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi yang dipaparkan dalam Laporan Kinerja akan digunakan sebagai *feedback* untuk perbaikan kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah di tahun yang akan datang.

Palu, 16 Maret 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah,

Faisal Anwar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas menyediakan data statistik dasar sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Tahun No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sebagai perwakilan BPS RI di Provinsi Sulawesi Tengah, BPS Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan tugas di bidang statistik. Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019. Ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015-2019, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015.

Pada awal tahun 2015, BPS Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Laporan kinerja tahunan wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang

dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peran data statistik dalam pembangunan di berbagai bidang, BPS dituntut untuk menghasilkan data statistik yang semakin berkualitas. Data BPS yang berkualitas digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan akurat yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2015.##

1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional Badan Pusat Statistik dan menyatakan kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pusat Statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik. Sementara itu, Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, menjelaskan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi sebagai berikut :

1. Kedudukan

BPS Provinsi Sulawesi Tengah adalah Perwakilan BPS di Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala BPS. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPS Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan statistik dasar di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di provinsi;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi;
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di provinsi;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi.

Dalam menyelenggarakan fungsinya BPS Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara makro di bidang statistik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Penetapan sistem informasi statistik di provinsi;
- d. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Susunan Organisasi

Sebagai instansi vertikal, BPS Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 33 perwakilan BPS di setiap provinsi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan statistik dasar di wilayahnya, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas memimpin BPS Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta membina aparatur agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. Bagian Tata Usaha terdiri dari Subbagian Bina Program, Subbagian Urusan Dalam, Subbagian Kepegawaian dan Hukum, Subbagian Keuangan dan Subbagian Perlengkapan.

c. Bidang Statistik Sosial

Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat, dan statistik ketahanan sosial. Bidang Statistik Sosial terdiri dari Seksi Statistik Kependudukan, Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Statistik Ketahanan Sosial.

d. Bidang Statistik Produksi

Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertanian, statistik industri serta statistik pertambangan, energi dan konstruksi. Bidang Statistik Produksi terdiri dari Seksi Statistik Pertanian, Seksi Statistik Industri, Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi.

e. Bidang Statistik Distribusi

Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen serta statistik niaga dan jasa. Bidang Statistik Distribusi terdiri dari Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar,

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen, Seksi Statistik Niaga dan Jasa.

f. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis statistik lintas sector. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik terdiri dari Seksi Neraca Produksi, Seksi Neraca Konsumsi, Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor.

g. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

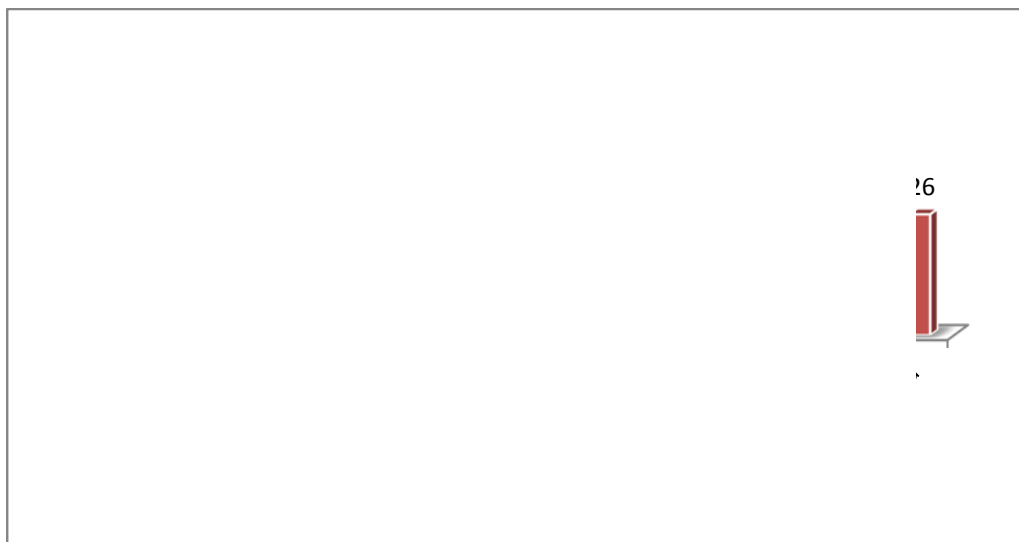
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik serta diseminasi dan layanan statistik. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik terdiri dari Seksi Integrasi Pengolahan Data, Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik, serta Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik.

Secara rinci bagan organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Lampiran 1.

1.4. Sumber Daya Manusia

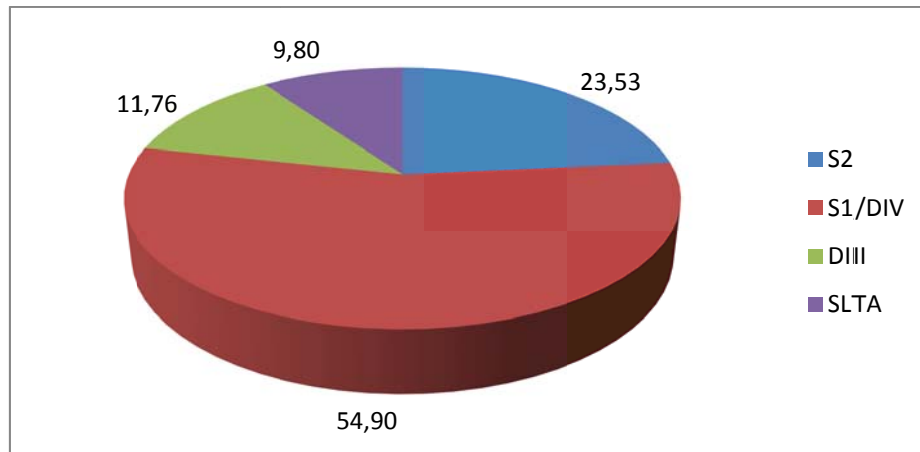
Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) turut menentukan kinerja suatu instansi. Jumlah pegawai BPS dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015 tercatat sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) orang, 54 (lima puluh empat) orang diantaranya adalah pegawai BPS Provinsi dan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang lainnya tersebar di 11 (sebelas) satker BPS Kabupaten/Kota secara proporsional sesuai dengan beban tugas masing-masing BPS Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPS Kabupaten/Kota yang beban kerjanya lebih besar mendapat

porsi jumlah pegawai yang lebih banyak. Penataan sebaran jumlah pegawai yang demikian, merupakan salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan kebutuhan data statistik agar dapat dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari eksistensi BPS di wilayahnya masing-masing.



Gambar 1. Jumlah Pegawai BPS Se-Sulawesi Tengah Menurut Satker Tahun 2015

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Persentase pegawai BPS Provinsi Sulawesi Tengah menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Persentase Pegawai BPS Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015

Sampai saat ini, SDM BPS Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tingkat pendidikan yang cukup baik. Berdasarkan gambar di atas, pegawai BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar memiliki jenjang pendidikan S1 bahkan yang memiliki jenjang pendidikan S2 pun cukup besar. Persentase pegawai dengan pendidikan S1/DIV sebesar 54,9 persen dan S2 sebesar 23,53 persen. Sementara itu, pegawai BPS Provinsi Sulawesi Tengah dengan jenjang pendidikan DIII sebesar 11,76 persen, sedangkan pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA sebesar 9,8 persen.

1.5. Potensi dan Permasalahan

Menjawab harapan dan tuntutan terhadap data yang berkualitas menjadi tantangan untuk meningkatkan peran BPS Provinsi Sulawesi Tengah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai satu-satunya badan penyedia data yang berkualitas dan terpercaya bagi semua pihak. Tantangan perubahan yang dihadapi BPS Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:

- a. Tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terhadap ragam dan kualitas data statistik semakin meningkat.
 - Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro
 - Mandat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu
 - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS
- b. Ada kecenderungan masyarakat enggan dan menolak untuk menjadi responden BPS. Rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi dengan benar, menyebabkan kualitas data dan *response rate* rendah.
- c. Koordinasi antara BPS Provinsi Sulawesi Tengah dengan instansi lain di lingkup Pemprov Sulawesi Tengah masih perlu ditingkatkan supaya konsep definisi dan standar klasifikasi yang digunakan seragam.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2015 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di BPS, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika penyajian laporan.

- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2015.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS 2015, Perkembangan Capaian Kinerja BPS, Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2015-2019, Prestasi tahun 2015, Kegiatan Prioritas BPS 2015 dan Realisasi Anggaran tahun 2015.
- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019

Memperhatikan lingkungan strategis nasional, regional, serta gambaran keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan maka pernyataan Visi BPS Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sama dan mengikuti visi BPS, yaitu;

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya di wilayahnya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS Provinsi Sulawesi Tengah baik pengguna data daerah, nasional maupun internasional.

Dengan visi tersebut, eksistensi BPS Provinsi Sulawesi Tengah menjadi semakin penting karena selain sebagai penyedia data dan informasi statistik juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Pernyataan misi BPS Provinsi Sulawesi Tengah juga sama dan mengikuti misi BPS dalam upaya mewujudkan visi, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pernyataan Visi dan Misi BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2019

VISI BPS 2015-2019	Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	MISI BPS 2015 -2019
		1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019 mengandung arti:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

Menyediakan data statistik ...

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.

... berkualitas ...

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, tepat waktu, koheren, mudah diakses, dan dapat diinterpretasikan”.

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ...

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*. Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”.

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

... pembinaan dan koordinasi ...

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik. (UU no. 16 tahun 1997).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS Provinsi Sulawesi Tengah dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS Provinsi Sulawesi Tengah sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

- a) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b) Pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c) Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;

- d) Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e) Pengembangan sistem informasi statistik;
- f) Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
- g) Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
- h) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS Provinsi Sulawesi Tengah, instansi pemerintah daerah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Membangun insan statistik ...

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.

... yang profesional...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... berintegritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Provinsi Sulawesi Tengah, maka ditetapkan tujuan yang harus yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian yang dapat dijelaskan melalui pemaparan tabel di bawah ini.

Tabel. 4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Sulawesi Tengah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	sumber data (<i>respondent engagement</i>)
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
	SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	80
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Jumlah <i>release</i> data yang tepat waktu	Aktivitas	73
	Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	41
	Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	10
1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>Respondent Engagement</i>)	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	100
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Persen	100
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	100
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	90
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	90
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Pengunjung	49.000
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	85
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	65
3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	60

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	12
	Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	72
3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	60

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah kepada Presiden atas penggunaan anggaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2015

Capaian kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2015. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK 2015 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut.

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah “peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas”, diukur dengan indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan pertama dicapai dengan tiga sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS dan (2) Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*Respondent Engagement*). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3. Capaian Kinerja Tujuan Pertama : Peningkatan Kualitas Data Statistik Melalui Kerangka Penjaminan Kualitas

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas				

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90	91,19	101,32
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90	91,19	101,32
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	80	77,5	96,87
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100	100	100
Jumlah release data statistik yang tepat waktu	Aktivitas	73	71	97,26
Jumlah publikasi/laporan Statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi	41	36	87,80
Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	10	9	90
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)				
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	100	99	99
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Persen	100	99	99
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga	Persen	100	99	99
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				96,70

Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 101,32 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 96,70 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai. Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator, masih ada dua indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 95 persen, yaitu: Jumlah publikasi/laporan Statistik yang terbit tepat waktu dan Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu capaian kinerjanya sebesar 87,80 persen dan 90 persen. Tidak

tercapainya indikator Jumlah publikasi/laporan Statistik yang terbit tepat waktu dan Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu dikarenakan target yang telah ditentukan mengikuti BPS RI sedangkan tidak semua *release data* yang dilakukan oleh BPS RI dilakukan pula di BPS Provinsi Sulawesi Tengah.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua adalah “peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, diukur dengan indikator persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4. Capaian Kinerja Tujuan Kedua : Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik				
Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	90,00	88,96	98,84
SS4. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)				
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	90,00	88,96	98,84
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Pengunjung	49.000	38.559	78,69
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	85,00	90,53	106,51
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	65,00	85,47	131,49
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				103,88

Berdasarkan tabel di atas, tujuan kedua juga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 109,84 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan kedua sebesar 113,54 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan kedua juga tercapai.

Tujuan kedua diwujudkan melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Motto yang diterapkan dalam PST adalah melayani dengan hati. Upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai tujuan kedua adalah melalui peningkatan pelayanan terhadap pengguna data melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). PST merupakan pelayanan yang bersifat *one gate services* dan *one stop services*. Di dalam PST terdapat unit pelayanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, data mikro dan penjualan publikasi softcopy/hardcopy. Pada dasarnya BPS Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan data kepada masyarakat secara gratis, kecuali untuk jenis publikasi tertentu menjadi objek Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik. Pengguna data BPS yang berkunjung ke PST mendapat pelayanan sebagaimana terlihat pada Gambar 7 di bawah.



Gambar 7. Alur Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah “peningkatan birokrasi yang akuntabel”, diukur dengan indikator hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat. Tujuan ketiga dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dan (2) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan : Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel

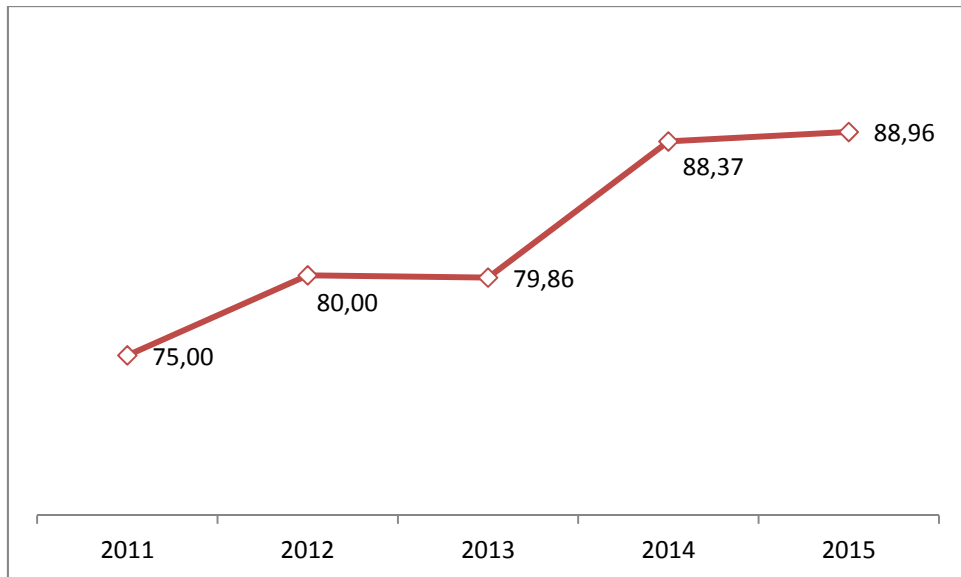
Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	60,00	67,33	112,22
SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS				
Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	35,00	31,65	90,43
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	72,00	78,53	109,07
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	60,00	67,33	112,22
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				103,91

Berdasarkan tabel di atas, tujuan ketiga juga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 112,22 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan ketiga sebesar 103,91 persen. “Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu” capaian kinerjanya sebesar 109,07 persen.

Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat mengalami kenaikan dari 47,62 poin pada tahun sebelumnya menjadi 67,33 poin pada tahun 2015 dan kenaikan tersebut melampaui target yang telah ditetapkan.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS

Perkembangan capaian kinerja 2015 jika dibandingkan dengan periode Renstra 2010-2014, untuk beberapa capaian kinerja tujuan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Perkembangan Persentase Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan Data BPS Provinsi Sulawesi Tengah (Tahun 2011-2015)

Berdasarkan gambar di atas, secara umum selama periode 2010-2015 rata-rata capaian kinerja khususnya tujuan kedua mengalami fluktuasi, hal ini mencerminkan bahwa BPS Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya.

3.3. Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2015-2019

Capaian kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah terhadap target Renstra 2015-2019 dihitung berdasarkan realisasi 2015 terhadap target 2015 pada Renstra 2015-2019. Capaian kinerja BPS terhadap target Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Kinerja 2015 terhadap Target Renstra 2015-2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90	91,19	101,32
SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90	91,19	101,32
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	80	77,5	96,87
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100	100	100
Jumlah release data statistik yang tepat waktu	Aktivitas	73	71	97,26
Jumlah publikasi/laporan Statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi	41	36	87,80
Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	10	9	90
SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)				
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	100	99	99
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	Persen	100	99	99
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	100	99	99

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik				
Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	90,00	88,96	98,84
SS4. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)				
Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	90,00	88,96	98,84
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Pengunjung	49.000	38.559	78,69
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	85,00	90,53	106,51
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	65,00	85,47	131,49
T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	60,00	67,33	112,22
SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS				
Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	35,00	31,65	90,43
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	72,00	78,53	109,07
SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	60,00	67,33	112,22
Rata-rata Capaian Indikator Tujuan				104,13
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				102,08

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2015-2019, sehingga target PK 2015 sama dengan target 2015 pada Renstra 2015-2019. Dengan demikian capaian kinerja terhadap PK 2015 sama dengan capaian kinerja terhadap renstra 2015-2019. Secara keseluruhan baik tujuan pertama

hingga tujuan keempat serta masing-masing sasaran strategisnya telah tercapai. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 104,13 dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 102,08.

3.4. Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Sulawesi Tengah 2015

Kegiatan prioritas BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015 diantaranya adalah : (1) Survei Penduduk Antara Sensus (SUPAS) 2015, (2) Hasil Sensus Pertanian (ST) 2013, (3) Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT), dan (4) Persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2016.

Survei Penduduk Antara Sensus (SUPAS) 2015

SUPAS 2015 merupakan kegiatan survei kependudukan yang dilakukan setiap lima tahun setelah pelaksanaan sensus penduduk. Hasil survei ini akan digunakan sebagai rujukan dan mengoreksi hasil penghitungan proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2010. Data kependudukan yang dikumpulkan mencakup data pokok penduduk, kejadian kelahiran, kejadian kematian, dan perpindahan penduduk.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan daerah perkotaan/pedesaan; menyediakan data dasar untuk penghitungan parameter demografi; memperkirakan angka kematian ibu/maternal; dan menyediakan data untuk penghitungan indikator yang terkait dengan kependudukan dan kesejahteraan sosial. Output dari kegiatan ini adalah Publikasi SUPAS 2015.

Hasil Sensus Pertanian (ST) 2013: Analisis Tematik dan Subsektor

Sensus Pertanian (ST) 2013 telah dilaksanakan pada tahun 2013, rangkaian analisisnya dilakukan hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 dilaksanakan analisis tematik dan subsektor. Tujuan dari analisis tematik adalah

optimalisasi pemanfaatan data hasil ST2013 oleh instansi di luar BPS agar evaluasi, perencanaan dan kebijakan pembangunan pertanian menjadi lebih terarah; eksplorasi terhadap isu pertanian terkini terutama berkaitan dengan Nawacita sektor pertanian, yaitu Peningkatan Kedaulatan Pangan; dan penyusunan indikator-indikator baru.

Sedangkan analisis subsektor merupakan analisis terhadap hasil Survei Rumah Tangga Usaha Rumah Tangga Subsektor Pertanian 2014 yang mencakup 9 jenis usaha pertanian, yaitu tanaman padi, tanaman palawija, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, budidaya tanaman kehutanan, kehutanan, budidaya ikan, dan penangkapan ikan. Melalui kegiatan ini diharapkan gambaran kondisi usaha pertanian pada beberapa komoditas unggulan dapat disampaikan kepada publik. Sebagai output dari kegiatan analisis subsektor disusunlah 1 publikasi.

Pendataan Basis Data Terpadu (PBDT)

Kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 merupakan tindak lanjut Inpres No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif. Data yang dimutakhirkan adalah Basis Data Terpadu yang ada di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Secara garis besar pelaksanaan PBDT2015 dilakukan melalui 3 tahapan yaitu : Forum Konsultasi Publik (FKP), pendataan rumah tangga dan pemeringkatan rumah tangga yang didasarkan pada tingkat kesejahteraannya. Output dari kegiatan ini adalah satu set data rumah tangga yang berisi data individu rumah tangga mencakup nama, alamat serta berbagai karakteristik sosial ekonomi lainnya hasil pemutakhiran basis data terpadu. Rangkaian kegiatan PBDT 2015 diakhiri dengan diserahkannya Basis Data Terpadu (BDT) 2015 kepada pemerintah (sekretariat wakil presiden).

Persiapan Sensus Ekonomi (SE) 2016

Persiapan SE 2016 yang dilakukan pada tahun 2015 antara lain: (1) Updating Direktori Usaha/Perusahaan Skala Menengah besar (UMB) Tahap 2, (6) Penggambaran Peta Blok Sensus Bermuatan Ekonomi, dan (7) Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016. Updating Direktori Usaha/Perusahaan Skala Menengah besar (UMB) Tahap 2 merupakan salah satu kegiatan pendahuluan dari keseluruhan rangkaian kegiatan SE2016, yang bertujuan untuk memperoleh direktori awal UMB yang lengkap dan *up to date*, dengan memanfaatkan data administrasi dari Instansi Kementrian/Lembaga/Dinas, Asosiasi dan sumber data organisasi lainnya.

Penggambaran Peta Blok Sensus Bermuatan Ekonomi meliputi pemutakhiran wilayah kerja statistik khusus pada wilayah konsentrasi kegiatan ekonomi dan BS persiapan yang saat ini sudah bermuatan. Bersamaan dengan kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan updating peta desa dan BS dan pemutakhiran master file desa (MFD). Pembentukan Master Frame Blok Sensus SE2016 bertujuan untuk memperoleh gambaran awal muatan kegiatan ekonomi di dalam blok sensus yang selanjutnya digunakan untuk membentuk area frame kegiatan ekonomi yang lebih terkini.

3.8. Realisasi Anggaran Tahun 2015

Pagu yang diberikan ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2015 adalah sebesar Rp. 21.029.275.000, terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Menurut Program

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	7.231.383.000	7.177.251.597	99,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	7.444.370.000	7.415.131.000	99,61
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	6.353.522.000	5.804.562.106	91,36
Total	21.029.275.000	20.396.944.703	96,99

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 99,25 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 99,61 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 91,36 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PPIS paling kecil diantara program yang lainnya, sedangkan penyerapan program PSPA paling besar di antara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan adalah sebesar 96,99 persen dari total pagu.

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran 2015 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut Program

Program	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	100,00	99,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	100,00	99,61
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	97,94	91,36
Rata-rata	99,31	96,99

Berdasarkan tabel di atas, hampir seluruh program memiliki capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggarannya, Secara rata-rata capaian kinerja program sebesar 99,31 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran secara total yaitu 96,60 persen. Hal ini mencerminkan bahwa BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil melakukan efisiensi penganggaran sesuai tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja.

BAB IV P E N U T U P

4.1. Tinjauan Umum

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, BPS Provinsi Sulawesi Tengah menyusun tiga tujuan dan lima sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2015. Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra 2015-2019. Tujuan yang akan dicapai BPS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 adalah (i) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas data, (ii) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan (iii) peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Realisasi kinerja semua tujuan sudah tercapai, dengan demikian capaian kerjanya pun terpenuhi bahkan melebihi target yaitu capaian kinerja tujuan pertama adalah 101,32 persen, capaian kinerja tujuan kedua adalah 98,84 persen dan capaian kinerja tujuan ketiga sebesar 112,22 persen. Rata-rata capaian kinerja tujuan secara keseluruhan adalah sebesar 104,13 persen. Seluruh jajaran BPS Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya untuk mencapai tujuan BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Kedepannya diharapkan kinerja, koordinasi, dan kerjasama yang lebih optimal sehingga apa yang telah diperoleh dapat dipertahankan bahkan dapat melebihi target.

Kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS Provinsi Sulawesi Tengah harus mampu memenuhi standar manajemen mutu. Standarisasi tersebut dimaksud agar dapat diketahui alur proses kegiatan dalam penyusunan data dan informasi statistik secara jelas dan transparan. Dengan semangat reformasi statistik, maka pelayanan dan pengembangan informasi statistik tidak hanya menghasilkan keragaman data tetapi juga harus menghasilkan kualitas data. Jaminan kualitas menjadikan BPS Provinsi Sulawesi Tengah menjadi lebih kredibel dan akuntabel di tingkat daerah.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah:

- (1) Menambahkan indikator baru pada sasaran strategis ketiga sesuai amanat UU Statistik Nomor 16 tahun 1997. Indikator baru tersebut adalah “Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional”.
- (2) Melakukan retargeting pada indikator “Jumlah release data statistik yang tepat waktu” sesuai realisasi pada tahun 2015.
- (3) Mengembangkan Matriks Rencana Aksi dengan menampung proses internal (kinerja eselon IV).
- (4) Mengembangkan sistem aplikasi pengisian data kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Aplikasi juga dilengkapi dengan kinerja anggaran dalam rangka mendukung kinerja program dan kegiatan.

Monitoring Capaian Kinerja BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2015

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				Realisasi				Terhadap Target Setahun			
				Tw1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	Tw1	Tw 2	Tw 3	Tw 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Peningkatan kualitas data statistik	1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	0	0	90	90	0	0	91,19	91,19	0	0	101,32	101,32
1.1.	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	0	0	90	90	0	0	91,19	91,19	0	0	101,32	101,32
		1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	0	0	80	80	0	0	77,5	77,5	0	0	96,88	96,88
		1.1.c. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
		1.1.d. Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	19	35	58	73	19	35	58	71	26,03	47,95	79,45	97,26
		1.1.e. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	2	10	18	41	2	10	18	36	4,88	24,39	43,9	87,8
		1.1.f. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	0	0	0	10	0	0	0	9	0	0	0	90
1.2.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)	1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	99
		1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	99
		1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	99
2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	0	0	90	90	0	0	88,96	88,96	0	0	98,84	98,84
2.1.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	2.1.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	0	0	90	90	0	0	88,96	88,96	0	0	98,84	98,84
		2.1.b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	12.250	24.500	36.750	49.000	12.729	20.436	27.601	38.559	25,98	41,71	56,33	78,69
		2.1.c. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	0	0	85	85	0	0	90,53	90,53	0	0	106,51	106,51
		2.1.c. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	0	0	65	65	0	0	85,47	85,47	0	0	131,49	131,49

3	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	0	0	60	60	0	0	67,33	67,33	0	0	112,22	112,22
3.1.	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS	3.1.a. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	Persen	12	12	12	35	32,11	31,65	31,65	31,65	91,74	90,43	90,43	90,43
		3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	Persen	72	72	72	72	69,23	69,23	69,23	78,53	96,15	96,15	96,15	109,07
3.2.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	0	0	60	60	0	0	67,33	67,33	0	0	112,22	112,22